



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ANWAR BASHORI
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 271766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 10.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/100 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 920.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED FREED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 G/AT SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

3. MOBIL, MERCEDES BENZ C 250 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 225.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.102.462.250

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.166.777.945

F. HARTA LAINNYA Rp. 77.535.362

Sub Total Rp. 15.867.675.557

III. HUTANG Rp. 1.223.070.930

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.644.604.627

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.